

PAPER

**“ANALISIS HUBUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG”**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi

Dosen Pengampu: Prof. Intan Fitri Meutia, SAN., MA., Ph.D.



OLEH:

AULIA CHAIRUNNISA

NPM: 2316041029

KELAS: MAGANG BERDAMPAK (MBKM)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan organisasi internasional serta dampaknya terhadap pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dalam era globalisasi, tata kelola pemerintahan tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan dipengaruhi oleh norma dan standar global yang berkembang melalui kerja sama internasional. Salah satu bentuk keterlibatan Ombudsman RI adalah keanggotaannya dalam *International Ombudsman Institute*, yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antarnegara.

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif melalui studi literatur dan pengamatan terhadap praktik kelembagaan Ombudsman. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan internasional memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta adopsi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan, sistem pengaduan yang lebih efektif, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya di tingkat daerah masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan konteks sosial-budaya, serta kesiapan institusi. Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi agar standar global dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Ombudsman RI dan organisasi internasional memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan kualitas pengawasan pelayanan publik secara berkelanjutan, meskipun tetap memerlukan penyesuaian dalam implementasinya di tingkat daerah.

Kata kunci: Ombudsman, organisasi internasional, pelayanan publik, globalisasi, *good governance*.

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa perubahan dalam cara negara menjalankan pemerintahan. Jika sebelumnya tata kelola pemerintahan lebih banyak berfokus pada urusan dalam negeri, kini pemerintah justru semakin terhubung dengan dinamika internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi internasional, dalam menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Standar ini kemudian menjadi acuan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk terus memperbaiki sistem administrasi publik agar lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, peran pengawasan terhadap pelayanan publik dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini hadir untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi terkait berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI tidak hanya berfokus pada pengawasan di dalam negeri, tetapi juga aktif menjalin hubungan dengan organisasi internasional seperti International Ombudsman Institute. Melalui keterlibatan dalam jaringan internasional tersebut, Ombudsman RI dapat saling bertukar pengalaman, mempelajari praktik terbaik dari negara lain, serta menyesuaikan standar global dengan kondisi di Indonesia. Hal ini tidak hanya membantu memperkuat kapasitas lembaga, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di tingkat daerah, Ombudsman RI memiliki perwakilan yang berperan langsung dalam mengawasi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya di Provinsi Lampung. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadi garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan organisasi internasional, perwakilan ini tetap menjalankan tugas berdasarkan kebijakan dan standar yang telah dipengaruhi oleh kerja sama internasional di tingkat pusat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara Ombudsman RI dengan organisasi internasional tidak hanya berdampak di tingkat pusat, tetapi juga dirasakan hingga ke tingkat daerah. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan standar pelayanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan perkumpulan negara yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan utama menjaga perdamaian dunia serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara. Kemunculannya berawal pada abad ke-19, yang dipicu oleh perkembangan industri dan kemajuan transportasi, sehingga lahir berbagai organisasi awal seperti Serikat Telegraph dan Serikat Pos Universal. Keberadaan organisasi internasional menjadi sangat penting karena pada dasarnya tidak ada negara yang mampu berkembang secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah yang dapat menghimpun berbagai kepentingan, baik di bidang politik, ekonomi, keamanan, maupun kesejahteraan dalam skala global (Adelia et al., 2024).

Organisasi internasional merupakan bentuk kerja sama yang dibentuk oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama di tingkat global. Organisasi ini biasanya memiliki struktur yang jelas, aturan yang disepakati bersama, serta mekanisme kerja yang mengatur hubungan antaranggota dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keberadaan organisasi internasional menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana berbagai permasalahan tidak lagi terbatas pada satu negara saja. Isu-isu seperti hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, lingkungan, dan pelayanan publik membutuhkan kerja sama lintas negara agar dapat ditangani secara efektif. Oleh karena itu, organisasi internasional hadir sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global tersebut. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam organisasi internasional bertujuan untuk memperkuat peran di forum global sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain sebagai forum kerja sama, organisasi internasional juga berperan dalam membentuk norma dan standar global yang menjadi acuan bagi negara-negara anggotanya. Standar ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya standar tersebut, negara-negara didorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu contoh organisasi internasional adalah United Nations yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia, mendorong pembangunan, serta memperkuat kerja sama antarnegara. Keberadaan organisasi seperti ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan modern. Dengan demikian, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menciptakan sistem global yang lebih teratur, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

2.2 Pengertian Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, maupun pihak swasta yang diberi tugas pelayanan publik. Lembaga ini bersifat independen dan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Selain berada di tingkat pusat, Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki perwakilan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung berfungsi sebagai perpanjangan tangan lembaga pusat dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik secara langsung di tingkat daerah. Perwakilan ini memiliki peran penting dalam menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2.3 Hubungan Ombudsman Republik Indonesia dengan Organisasi Internasional

Dalam era globalisasi saat ini, hubungan antara lembaga negara dengan organisasi internasional menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan dunia yang semakin terbuka membuat tata kelola pemerintahan tidak lagi berjalan secara eksklusif di dalam batas negara, melainkan turut dipengaruhi oleh nilai, norma, dan standar global. Hal ini juga berlaku bagi Ombudsman Republik Indonesia, yang meskipun memiliki tugas utama dalam

pengawasan pelayanan publik di dalam negeri, tetap berinteraksi dan terhubung dengan berbagai organisasi internasional (Ombudsman RI, 2023).

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga bagian dari perhatian global, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *good governance*, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks ini, Ombudsman RI tidak bekerja secara terisolasi, melainkan menjadi bagian dari komunitas internasional yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan akuntabel (Kmur, 2025). Salah satu bentuk nyata dari hubungan tersebut adalah keanggotaan Ombudsman RI dalam International Ombudsman Institute, yaitu organisasi global yang menaungi lebih dari 200 lembaga ombudsman dari berbagai negara. Melalui keanggotaan ini, Ombudsman RI memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai forum internasional, seperti pertemuan regional, seminar, dan diskusi yang membahas penguatan peran lembaga ombudsman dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam keanggotaan ini, Ombudsman RI tidak hanya menjadi peserta biasa, tetapi juga memiliki status voting member, yang berarti turut memiliki hak suara dalam berbagai keputusan penting di tingkat internasional. IOI sendiri telah berdiri sejak tahun 1978 dan terbagi ke dalam enam wilayah regional, di mana Ombudsman RI aktif berpartisipasi dalam forum kawasan Asia melalui berbagai pertemuan dan diskusi bersama lembaga ombudsman negara lain. Melalui forum-forum tersebut, Ombudsman RI dapat melakukan pertukaran informasi, pengalaman, serta praktik terbaik (*best practices*) dalam menangani berbagai permasalahan maladministrasi. Tidak hanya itu, keterlibatan ini juga membuka ruang pembelajaran dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem pengawasan pelayanan publik yang efektif. Dengan demikian, Ombudsman RI dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya (Ombudsman RI, 2023).

Selain sebagai sarana pembelajaran, hubungan ini juga berperan penting dalam mendorong adopsi standar internasional, seperti prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar-standar tersebut, termasuk prinsip Venice Principles dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi acuan penting agar sistem pengawasan di Indonesia sejalan dengan praktik global yang diakui secara internasional (Ombudsman RI, 2023). Lebih jauh lagi, keterlibatan Ombudsman RI dalam jaringan internasional juga mencerminkan peran lembaga ini sebagai bagian dari diplomasi non-formal

negara. Melalui penguatan kualitas pelayanan publik di dalam negeri, Ombudsman RI secara tidak langsung turut membangun citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak masyarakat (Kmur, 2025). Sehingga dapat di simpulkan bahwa hubungan antara Ombudsman RI dengan organisasi internasional tidak hanya bersifat formal atau simbolis semata, tetapi memiliki dampak yang nyata. Hubungan ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong Indonesia untuk terus beradaptasi dengan standar global dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Palalo, 2025).

2.4 Dampak Hubungan Internasional terhadap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung

Hubungan internasional yang dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tingkat pusat ternyata tidak berhenti hanya pada forum global atau kerja sama antarnegara saja. Dampaknya juga terasa hingga ke tingkat daerah, termasuk pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya standar dalam pengawasan pelayanan publik. Melalui keterlibatan Ombudsman RI dalam organisasi internasional seperti International Ombudsman Institute, berbagai nilai dan prinsip global seperti transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pelayanan publik turut diadopsi dan diterapkan dalam sistem kerja Ombudsman, termasuk di tingkat perwakilan daerah (Ombudsman RI, 2023). Hal ini membuat proses penanganan laporan masyarakat di Lampung tidak lagi sekadar mengikuti aturan nasional, tetapi juga telah menyesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Selain itu, hubungan internasional juga berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengalaman, pengetahuan, serta praktik terbaik (*best practices*) yang diperoleh Ombudsman RI dari forum internasional kemudian diturunkan ke seluruh perwakilan, termasuk Lampung, melalui pelatihan, pembinaan, maupun penguatan sistem kerja internal. Dengan demikian, pegawai di Ombudsman Lampung tidak hanya bekerja berdasarkan pengalaman lokal, tetapi juga memiliki wawasan yang lebih luas terkait praktik pengawasan pelayanan publik di berbagai negara. Dampak lainnya dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Ketika sistem pengawasan menjadi lebih profesional, responsif, dan terukur, masyarakat pun cenderung lebih percaya untuk menyampaikan laporan atau pengaduan. Hal ini sejalan dengan upaya Ombudsman dalam

memperkuat citra lembaga sebagai pengawas yang independen dan berpihak pada kepentingan publik.

Di sisi lain, pengaruh hubungan internasional juga mendorong adanya inovasi dalam pelayanan, seperti pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih cepat dan efisien. Meskipun inovasi tersebut dikembangkan di tingkat pusat, implementasinya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Dengan demikian, meskipun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tidak secara langsung menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, dampak dari hubungan tersebut tetap sangat signifikan. Hubungan internasional menjadi fondasi penting dalam membentuk sistem kerja yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di tingkat daerah.

2.5 Analisis Hubungan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan organisasi internasional

Hubungan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan organisasi internasional pada dasarnya memberikan dampak yang cukup luas, terutama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Melalui keterlibatan dalam jaringan global seperti International Ombudsman Institute, Ombudsman RI tidak hanya memperoleh akses terhadap berbagai forum diskusi internasional, tetapi juga mendapatkan ruang untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam menangani maladministrasi. Hal ini menjadi penting karena persoalan pelayanan publik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang dihadapi banyak negara.

Dari sisi kelembagaan, hubungan ini mendorong Ombudsman RI untuk terus menyesuaikan diri dengan standar internasional, seperti prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Standar tersebut kemudian menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pengawasan di dalam negeri. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah, termasuk Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan adanya acuan global tersebut, proses penanganan laporan masyarakat menjadi lebih sistematis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak publik. Namun demikian, dalam implementasinya di tingkat daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan antara standar internasional dengan kondisi riil di lapangan. Praktik-praktik yang berhasil diterapkan di negara lain belum tentu dapat langsung diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah, karena adanya perbedaan

budaya birokrasi, tingkat kesadaran masyarakat, serta kapasitas institusi. Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi agar standar tersebut tetap relevan dan sesuai dengan konteks lokal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Tidak semua perwakilan Ombudsman di daerah memiliki jumlah pegawai, sarana, maupun dukungan teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan standar internasional secara optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas dalam menangani laporan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan, hubungan antara Ombudsman RI dengan organisasi internasional tetap memiliki peran strategis. Jaringan internasional memberikan dorongan bagi Ombudsman untuk terus berkembang, baik dari sisi kapasitas kelembagaan maupun kualitas pelayanan. Bagi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pelayanan publik. Dengan kata lain, hubungan internasional bukan hanya sekadar kerja sama formal, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan penguatan sistem pengawasan pelayanan publik di Indonesia secara berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa hubungan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan organisasi internasional, khususnya *International Ombudsman Institute (IOI)*, memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik di Indonesia. Hubungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan dampak nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau hingga ke daerah, termasuk pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Perwakilan daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik turut merasakan perubahan melalui peningkatan kualitas penanganan laporan masyarakat, sistem kerja yang lebih profesional, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional mampu menjadi jembatan pembelajaran dan penguatan institusi secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kondisi lokal, serta belum meratanya kesiapan institusi di daerah dalam mengadopsi standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan proses penyesuaian agar nilai-nilai global tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks lokal di Indonesia.

3.2 Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik ke depan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama.

1. Ombudsman Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat keterlibatan dalam jaringan internasional, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu berbagi pengalaman dan praktik baik dari Indonesia ke dunia internasional.
2. Perlu adanya penguatan kapasitas di tingkat daerah, termasuk pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan

pengaduan masyarakat. Hal ini penting agar standar internasional yang diadopsi dapat diimplementasikan secara optimal.

3. Dalam mengadopsi standar global, perlu dilakukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Artinya, praktik-praktik internasional yang baik perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan birokrasi di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat juga perlu terus didorong. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan maladministrasi merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan sinergi antara lembaga pengawas, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Z, C., Salsabila A, A., & Sari, P. T. (2024). Peran organisasi internasional di dalam suatu negara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 121-126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347>
- Asmanto, A. M. Y. (2021). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. ResearchGate.
- International Ombudsman Institute. (n.d.). The I.O.I. <https://www.theioi.org/the-i-o-i>
- International Ombudsman Institute. (2021, December). UN resolution on the ombudsman. <https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/un-resolution-on-the-ombudsman-final-version-now-available>
- Kmur, A. S. (2025, August 7). Peran Ombudsman RI sebagai media diplomasi. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/peran-ombudsman-ri-sebagai-media-diplomasi>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/164>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023, October 11). Komitmen Ombudsman RI dalam memperkuat efektivitas kerja dan kredibilitas Ombudsman internasional. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/komitmen-ombudsman-ri-dalam-memperkuat-efektivitas-kerja-dan-kredibilitas-ombudsman-internasional>
- Palalo, D. D. (2025, August 7). Ombudsman Republik Indonesia dan diplomasi perlindungan HAM. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-republik-indonesia-dan-diplomasi-perlindungan-ham>
- Peso, H. D., & Pranoto, E. (2022). Fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Juristic*, 3(01), 59–72.
- Sari, P. T. (2024). Peran organisasi internasional di dalam suatu negara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Shintiya, N. A. A. (2017). Peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik di Kota Bandar Lampung [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. Repository UIN Raden Intan Lampung.
- What is an organizational ombuds. (n.d.). International Ombuds Association. <https://www.ombudsassociation.org/what-is-an-organizational-ombuds>